

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agus, D. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan*. Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Bambang Sunggono (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Candra Irawan (2010) *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di*

*Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia.*

BandungMandar Maju

E. Saifullah Wiradipradja. (2015), *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung. Keni Media

H. Amran Suadi. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta Kencana

Hardijan Rusli. (2011). *Hukum ketenagakerjaan*. Bogor Ghalia Indonesia

Hj.Herniatih, dan Sri Lin Hartini.(2019). *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya. Media Sahabat Cendikia

I Made Sukadana. (2012). *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*. Jakarta. Prestasi Pustakaraya

Lalu Husni. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Rachmat Trijono. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta. Papas Sinar Sinanti

Sendjun H Manulang. (2001). *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta,

Susanti Adi Nugroho. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta. Kencana

Zaeni Asyhadie. (2008). *Hukum Kerja*. Mataram. Rajawali Pers

Zainal Asikin. (1993). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta. Rajawali Pers

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2008). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Nomor Per.31/MEN/XII/2008*. Dipetik December 2021

Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan. (t.thn.). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan*

Peraturan Pemerintah Tentang Pemutusan Hubungan Kerja. (t.thn.). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja*.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2. (2003). *Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2*.

Undang-Undang Dasar 1945. (t.thn.). *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 2 & Pasal 28 D Ayat 1*.

Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. (t.thn.). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 56 Ayat 1*.

Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. (t.thn.). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*.

### **Jurnal/Skripsi**

Teguh Rianto. (2016). Pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan. *Pakuan Law Review*. Vol. 2, No. 1

Yetniwati. (2017). Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan. *Jurnal Mimbar Hukum*

Muhammad Abas. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pemotongan Upah Pekerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Perusahaan Terdampak Covid 19. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*.

Halida Zia. (2020) . Kajian Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Karena Perusahaan Terdampak Covid-19. *Datin Law Jurnal*.

Pramudita. (2021). Pembuktian Sederhana Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Pekerja Atas Dasar Upah Yang Tidak Dibayar. *Jurist-Diction*.

Syahrial MH. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA. *Jurnal Universitas Pahlawan, IV(2)*, 21-29.

### **Sumber Lainnya**

Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia No.86/11/Th.XXIII, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

**<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5226556/4-alasan-mengapa-virus-corona-bisa-sangat-mematikan>, diakses pada tanggal 12 oktober 2021 pukul 15:17**

